

Penggunaan Forum Komunikasi Warga PLTU Batang Dalam Penyelesaian Konflik Di Pedesaan

(Studi Kasus Sosialisasi PLTU Batang di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang)

Rizki Kurnia Yuniasti

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang

ABSTRACT

Coal-fired power station development planned by PT Bhimasena Power Indonesia and The Batang District Government is one of the innovation for the Karanggeneng civilization, Kandeman Subdistrict of Batang District triggered some conflicts so that development project has been delayed. The research purpose is to describe the socialization and how the Communication Forum of Batang Coal-Fired Power Station can solve the conflict. The research is descriptive qualitative approach to understanding the perspective of interpretive while research method used is a case study method. The research theories are Uncertainty Reduction Theory, Diffusion of Innovation Theory, Triangle of Conflict Theory, The Principle of Negotiation theory, and The Convergence of Model Communication.

This research result indicates that the socialization of coal-fired power Batang done through the formal and informal sides. The obstacles in this socialization are late socialization, uncertainty of information because the other hand informations, social estrangement (social estrangement to be two namely pro and contra for Batang coal-fired power station) Batang coal-fired power station development and conflicts namely compensation land and social compensation. The communication forum of Batang coal-fired power station in the Karanggeneng Village have not been able to resolve the conflict in the Karanggeneng village. The communication forum Batang coal-fired power station experienced divergence at the time of the negotiation process due to the absence of mutual understanding. Negotiations containing the equivalent communication, openness information and mutual understanding is the communication models which is proper for the conflict resolution with The Convergence Communication Models.

Keywords: *The Conflict coal-fired power station of Batang, Socialization, The Communication Forum of Batang, Conflict Resolution.*

Latar Belakang Masalah

Sulitnya pembebasan lahan masyarakat PLTU Batang oleh pemerintah dan pemenang tender PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) disebabkan oleh sosialisasi awal yang tidak benar. Rencana pembangunan ini meliputi pra konstruksi blok PLTU, Pra Konstruksi jaringan transmisi dan gardu induk dari perusahaan setelah perusahaan melaksanakan survei, pengadaan lahan dan kompensasi. Sosialisasi pembangunan PLTU Batang seharusnya melibatkan aspek-aspek yang saling berkaitan yaitu akses informasi, partisipasi dan keadilan sehingga pelibatan masyarakat merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan pemrakarsa agar pembangunan tersebut berjalan dengan baik dan tidak membuat keresahan bagi masyarakat.

Masyarakat pedesaan mayoritas merupakan petani dan nelayan sebagai mata pencaharian utama mereka sehingga sosialisasi harus dilakukan dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh petani dan nelayan dan menggunakan komunikator yang memahami nilai, norma dan pandangan hidup masyarakat pedesaan. Salah satu wadah untuk sosialisasi yaitu forum komunikasi warga yang digunakan untuk sarana memberikan informasi kepada masyarakat.

Forum komunikasi tersebut bertujuan untuk menghimpun dan mendiskusikan semua permasalahan, harapan, ide, usulan, serta tanggapan dari para pemangku kepentingan (stakeholder). Forum Komunikasi Warga PLTU Batang yang dapat terbentuk hanyalah Forum Komunikasi Desa Karanggeneng, Desa Ujungnegero dan Desa Ponowareng. Pembentukan Forum Komunikasi Warga Desa Karanggeneng dilakukan di Balai desa Karanggeneng pada tanggal 7 November 2013.

Menurut Andal pembangunan PLTU Batang, keberadaan sikap masyarakat terhadap rencana

kegiatan dibarengi dengan informasi awal tentang rencana pembangunan PLTU yang diperoleh oleh warga lebih banyak dari sumber di luar pemrakarsa. Hal tersebut memunculkan ketidakakuratan informasi, akibatnya informasi yang berkembang seringkali kurang jelas dan kurang benar. Perbedaan sikap dan persepsi yang berbeda membuat masyarakat terpecah menjadi dua yaitu masyarakat pro pembangunan dan kontra pembangunan PLTU Batang.

Masyarakat yang menolak rencana pembangunan (kontra) terdapat pada keempat desa yaitu Desa Ponowareng, Desa Karanggeneng, Desa Kedungsegog dan Desa Ujungnegero sehingga memerlukan sosialisasi khusus dengan dibentuknya forum komunikasi warga. Sosialisasi pembangunan PLTU menimbulkan stereotipe dan prasangka dari warga sehingga muncul berbagai macam pendapat yang memicu konflik antar warga, sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penerimaan sosialisasi PT Bhimasena Power Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Batang dalam rencana pembangunan PLTU Batang di Desa Karanggeneng dan bagaimanakah penyelesaian konflik dengan masyarakat Desa Karanggeneng dalam rencana pembangunan PLTU Batang?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe pendekatan kualitatif deskriptif dengan pemahaman perspektif interpretif sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi kasus. Penelitian ini menggambarkan sosialisasi yang dilakukan oleh PT Bhimasena Power Indonesia guna mensukseskan pembangunan PLTU Batang di Desa Karanggeneng. Penelitian dilakukan di Kabupaten Batang dengan pemilihan lokasi Kecamatan Kandeman yang terkena dampak pembangunan PLTU Batang dan fokus penelitian pada Forum Komunikasi Warga PLTU Batang di Desa Karanggeneng.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu pernyataan-pernyataan yang diperoleh melalui wawancara *indepth interview* yang dilakukan oleh peneliti dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tambahan yang berasal dari sumber-sumber tertulis yaitu buku-buku, artikel, jurnal, makalah, koran dan lain sebagainya serta pengamatan langsung informan di lapangan yang sesuai dengan konflik PLTU Batang di Desa Karanggeneng, Kabupaten Batang sebagai data empiris.

Proposisi dalam penelitian ini yaitu: Ketidakpastian informasi akan rencana pembangunan PLTU Batang oleh masyarakat Desa Karanggeneng merupakan pemicu konflik; Proses sosialisasi yang terbuka dan terdapat solusi bagi masyarakat merupakan sarana yang efektif untuk membantu penyelesaian konflik PLTU Batang; Negosiasi yang tidak mementingkan posisi akan membantu keefektifan negosiasi dalam penyelesaian konflik dengan masyarakat. Analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah salah satu bentuk analisis dominan dalam studi kasus, yaitu strategi penggunaan logika penjadwalan pola.

Hasil dan Pembahasan

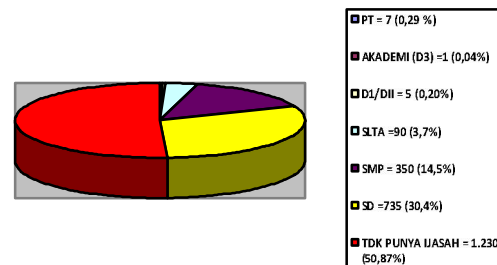
Gambaran umum daerah penelitian

Lokasi proyek pembangunan PLTU Batang terletak di Desa Ujungnegoro dan Desa Karanggeneng (Kecamatan Kandeman) dan sebagian lagi terletak di Desa Ponowareng (Kecamatan Tulis) Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sedangkan untuk jalur transisi akan melewati Desa Karanggeneng dan Desa Wonokerso di Kecamatan Kandeman, Desa Ponowareng, Desa Kenconorejo, Desa Simbangjati, Desa Beji, Desa Tulis dan Desa Wringin Gantung di Kecamatan Tulis.

Rencana pembangunan PLTU Batang menjadi isu yang besar karena mengangkut pembebasan tanah, terutama lahan yang menjadi tapak (*power block*) yang terletak di tiga desa yaitu Desa Ujungnegoro, Karanggeneng dan Ponowareng. Lahan yang dibutuhkan mencapai 226,4 Ha dan sebagian besar merupakan sawah dan kebun melati.

Menurut Kecamatan Kandeman dalam Angka tahun 2013, Penduduk Desa Karanggeneng yang berpendidikan hingga jenjang perguruan tinggi pada tahun 2012 hanya 7 orang sedangkan lulusan D3 sebanyak 1 orang dan lulusan D1 yaitu 5 orang sedangkan tamatan SMA 90 orang. Tamatan SD 735 dan tamatan SMP 350 orang, dapat dilihat dalam diagram dibawah ini, mayoritas warga Desa Karanggeneng belum mempunyai ijazah sebanyak 1.230 orang dan sebagian besar merupakan tamatan SD.

Diagram 2.4 Sebaran Penduduk Desa Karanggeneng Berdasarkan Pendidikan pada Tahun 2013

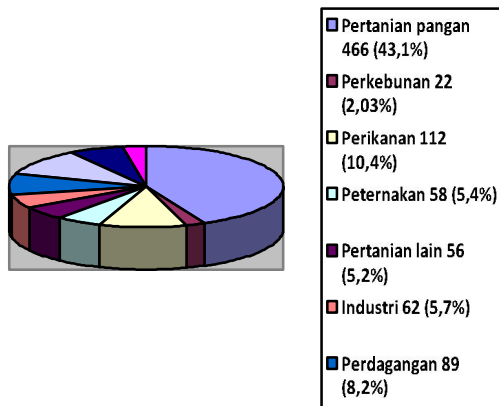


Sumber : Diolah dari Data BPS Kabupaten Batang, Kecamatan Kandeman dalam Angka 2013

Desa Karanggeneng merupakan desa dengan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, hal ini dapat dilihat di Kecamatan Kandeman dalam Angka 2013 dari 1.081 orang pekerja sebesar 466 atau sebesar 43,1 % dari orang bekerja di sektor pertanian tanaman pangan. Terdapat sebanyak 427 keluarga petani di Desa Karanggeneng pada tahun 2013.

Berdasarkan diagram di bawah dapat dilihat bahwa selain bidang pertanian pangan, bidang pekerjaan utama lainnya yaitu di sektor perikanan sebesar 112 orang dan sektor jasa sebesar 117 orang. Ketiga sektor inilah yang mendominasi profesi masyarakat di Desa Karanggeneng.

Diagram 2.5 Sebaran penduduk Desa Karanggeneng berdasarkan mata pencaharian pada tahun 2013



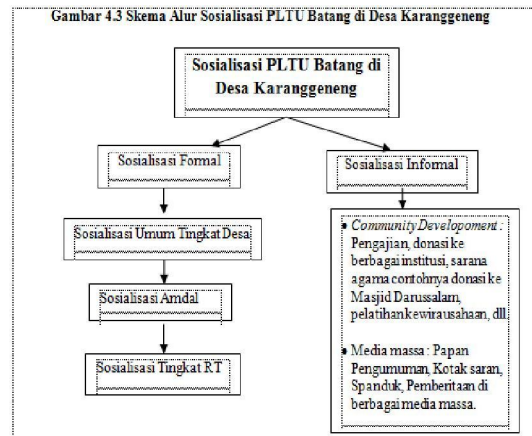
Sumber : Diolah dari Data BPS Kabupaten Batang, Kecamatan Kandeman dalam Angka 2013

Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan melibatkan 7 (tujuh) informan. Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan ini melibatkan beberapa tokoh masyarakat Desa Karanggeneng dan pihak Pemerintahan Kabupaten Batang.

Sosialisasi Terbuka dan Terdapat Solusi

Sosialisasi bertujuan untuk menyesuaikan masyarakat terhadap rencana PLTU Batang yang akan dibangun di desa mereka. Sosialisasi dilakukan dengan 2 cara yaitu sosialisasi formal dan informal. Sosialisasi formal dengan sosialisasi resmi di Balai Desa Karanggeneng dengan menggunakan metode ceramah dan sosialisasi informal dengan pendekatan

community development atau pemberdayaan masyarakat.



Materi sosialisasi pertama yaitu sosialisasi umum tingkat desa menyampaikan gambaran umum dan juga menyertakan pihak pemrakarsa dari Jepang. Sosialisasi amdal berisi analisis dampak secara menyeluruh dikaji oleh berbagai akademisi dan bidang ilmu sedangkan sosialisasi terakhir mengenai pertanggung jawaban perusahaan terhadap masyarakat yang terkena dampak oleh PLTU sehingga memerlukan sosialisasi yang terbuka dan terdapat solusi agar kedua belah pihak baik masyarakat dan pihak pemrakarsa mempunyai penilaian yang sama.

Sosialisasi umum tingkat desa di Karanggeneng tidak berjalan lancar karena terdapat *walk out* dari salah satu tokoh masyarakat. Situasi konflik Desa Karanggeneng tidak memungkinkan untuk menjalin saling pengertian antara pihak pemrakarsa dan masyarakat. Sikap divergensi juga dilakukan oleh pihak pemrakarsa dengan menggunakan tirai-tirai atau penutup pada saat sosialisasi amdal agar sosialisasi berjalan dengan lancar. Pengawasan yang ketat oleh aparat membuat masyarakat tidak dapat mendengarkan informasi yang disampaikan oleh pihak pemrakarsa. Sikap divergensi tokoh masyarakat membuat sosialisasi semakin sulit dilakukan karena tidak akan

mencapai *mutual understanding* bersama-sama dan menutup akses informasi dari pihak pemrakarsa sehingga menimbulkan ketidakpastian informasi.

Ketidakpastian Informasi Rencana Pembangunan PLTU Batang sebagai Pemicu Konflik PLTU Batang

Masyarakat Desa Karanggeneng mengalami ketidakpastian informasi karena rencana pembangunan PLTU Batang ini akan menyangkut wilayah desa mereka. Ketidakpastian merupakan keadaan yang tidak menyenangkan, menimbulkan stress. Ketidakpastian informasi merupakan kondisi dimana keadaan tidak menyenangkan dan menimbulkan stress disebabkan tidak memperoleh informasi yang berguna untuk dirinya.

Pencarian informasi dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian yang menimbulkan stres. Pencarian dilakukan oleh setiap individu di Desa Karanggeneng terutama tokoh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh enam narasumber dalam *indepht interview* bahwa penyebaran informasi rencana pembangunan melalui mulut ke mulut dan *door to door*. Penyebaran informasi melalui mulut ke mulut sangat efektif di masyarakat pedesaan mengingat seberapa besar masyarakat Desa Karanggeneng berprofesi sebagai petani.

Pencarian informasi oleh individu di Desa Karanggeneng melalui perbincangan antar warga. Adanya pihak lain dalam penyebaran informasi rencana pembangunan juga mempengaruhi keadaan ketidakpastian. Untuk mengurangi ketidakpastian tokoh masyarakat mencari informasi dari LSM-LSM yang dianggap pengetahuannya lebih tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga berpengaruh dalam menerima penjelasan dari LSM-

LSM karena masyarakat menerima mentah informasi tersebut tanpa menyaringnya terlebih dahulu.

Arus Komunikasi

Pada difusi inovasi agen-agen perubahan memainkan peran kunci dalam tahap evaluasi dan percobaan. Agen perubahan (*change agent*) adalah seorang profesional yang berusaha untuk mempengaruhi keputusan adopsi dalam arah yang menurutnya dikehendaki (Severin, 2009:251). Dalam hal ini agen perubahan yaitu PT BPI dan Pemerintah Kabupaten Batang yang menginginkan proyek pembangunan PLTU Batang berjalan dengan lancar dengan menggunakan pemimpin opini lokal. Pemimpin lokal seperti Kepala Desa Karanggeneng dan perangkatnya, tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan (tokoh agama, anggota BPD, ketua RT, ketua RW). Tokoh-tokoh ini dianggap memiliki pengetahuan dan status yang lebih dibandingkan masyarakat pada umumnya.

Selain memerlukan agen perubahan difusi inovasi juga saluran-saluran komunikasi untuk menyebarkan inovasi tersebut. Saluran-saluran komunikasi mungkin berupa hubungan antarpribadi atau media massa yang benar-benar ada atau mungkin berasal dari sumber kosmopolit atau lokal (Roger, 1995) (Saverin, 2009:251).

Saluran komunikasi kosmopolit (*cosmopolite*) adalah saluran komunikasi yang berada di luar sistem sosial yang sedang diselidiki. Saluran komunikasi kosmopolit ini yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang dan PT BPI. Sosialisasi dilakukan bertahap yaitu sosialisasi umum, sosialisasi AMDAL dan sosialisasi tingkat RT yang dilakukan melalui *community development*.

Saluran lokalit (*lokality*) adalah saluran yang berasal dari dalam sistem sosial. Saluran lokalit yaitu forum komunikasi warga karena panitia forum komunikasi merupakan perwakilan masyarakat dalam

mengomunikasikan informasi kepada kedua pihak yaitu masyarakat Desa Karanggeneng. *Selapanan desa* yang dilakukan oleh Kepala Desa Karanggeneng dalam menyebarkan informasi pembangunan juga termasuk dalam saluran lokalit.

Saluran lokalit di Desa Karanggeneng sangat berpengaruh dalam difusi inovasi. Seperti yang disampaikan enam informan dari Karanggeneng yang mengatakan bahwa selain selapanan desa dan perbincangan di desa terdapat perkumpulan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyebarkan inovasi di Desa Karanggeneng. Perkumpulan dilakukan minimal 3 kali dalam seminggu di beberapa tempat. Biasanya tempat yang digunakan adalah rumah para tokoh masyarakat. Perkumpulan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menolak (kontra) PLTU.

Perkumpulan dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian individu-individu di Desa Karanggeneng. Peran pemimpin lokal dikatakan oleh Walyono yang menyatakan bahwa setiap individu di Desa Karanggeneng memiliki tokohnya masing-masing. Tokoh-tokoh tersebut yang nantinya menjadi pegangan individu tersebut dalam mendapatkan informasi. Masyarakat Desa Karanggeneng akan bertanya pada tokoh-tokoh tersebut mengenai perkembangan PLTU Batang.

Kerenggangan Sosial (Terpecahnya Masyarakat menjadi Pro dan Kontra Pembangunan PLTU)

Proses sosial merupakan proses dinamis sehingga apabila terdapat perbedaan pendapat antara setiap individu terutama pengadopsi dini atau tokoh masyarakat maka inovasi tersebut juga akan ditentang oleh pendukung tokoh tersebut. Pedesaan merupakan tempat dimana masyarakat masih kuat memegang tradisi desanya. Penyebaran inovasi tersebut harus disesuaikan dengan proses sosial di Desa

Karanggeneng yang masih memegang tradisi desanya. Dengan perbedaan tokoh masyarakat Desa Karanggeneng membuat interaksi sosial masyarakat terganggu.

Kerenggangan ini juga dapat dilihat saat *takziah* jika ada salah satu anggota masyarakat meninggal. Tradisi seperti *tahlilah*, *selamatan*, acara pernikahan tidak berjalan seperti dahulu karena masyarakat tidak akan menghadiri acara jika masyarakat tersebut tidak sepaham dengannya. Hal ini dikarenakan persentase masyarakat penolak PLTU menurut Kunasir hampir mendekati 70% seluruh masyarakat Desa Karanggeneng. Sisanya 30% adalah masyarakat yang mendukung PLTU Batang salah satunya termasuk kepala desa beserta perangkatnya tidak dianggap sebagai pihak netral tetapi pihak pro rencana pembangunan PLTU Batang.

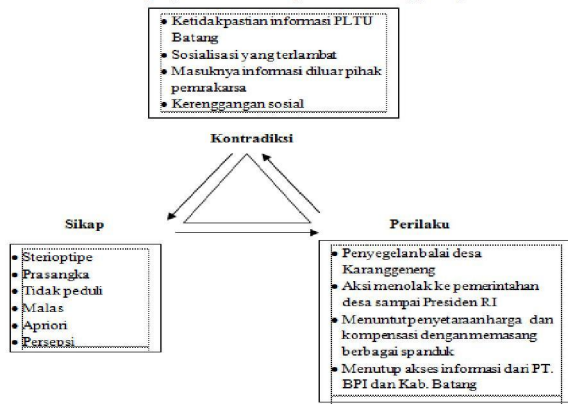
Konflik PLTU Batang Sebagai Hambatan Sosialisasi

Konflik PLTU Batang dimulai dari perbedaan pendapat tokoh-tokoh masyarakat Desa Karanggeneng. Proses keputusan inovasi adalah proses dimana individu akan membuat keputusan. Proses ini akan mengakibatkan konsekuensi (*consequences*) pada individu yang menerima inovasi. Konsekuensi adalah perubahan yang terjadi pada individu atau sistem sosial sebagai akibat adopsi atau penolakan pada inovasi (Saverin, 2008:249). Rogers menyatakan bahwa tidak semua inovasi meskipun sudah dirancang dengan baik pasti memiliki konsekuensi-konsekuensi yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki.

Galtung memperlihatkan berbagai individu, kelompok dan organisasi membawa kepentingannya masing-masing. Kepentingan ini membentuk perilaku-perilaku tertentu yang dapat menciptakan ketegangan. Kepentingan dari setiap individu mengenai inovasi PLTU Batang ini berbeda-beda. Konflik PLTU Batang

secara sederhana dapat digambarkan seperti dibawah ini:

Gambar 4.4 Segitiga Konflik Galtung di Desa Karanggeneng



Sikap adalah persepsi etnis mengenai isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kelompok lain. Lebih dari 70% masyarakat Desa Karanggeneng pada mulanya menolak pembangunan PLTU Batang oleh karena itu masyarakat berpandangan bahwa rencana pembangunan PLTU merugikan masyarakat.

Perilaku dapat berupa kerjasama, persaingan atau paksaan, suatu gerak tangan dan tubuh yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan. Perilaku sebagian besar tokoh masyarakat Desa Karanggeneng setelah menerima informasi rencana tersebut yaitu menolak pembangunan PLTU Batang. Perilaku ini menurut enam informan dan dapat dilihat di berbagai media massa yaitu penyegealan balai desa, aksi demonstrasi, pemugaran pagar masjid, konflik kompensasi tanah, dan menutup akses informasi dari pemrakarsa. Kontradiksi di sini yaitu ketidakpastian informasi PLTU Batang, masuknya informasi diluar pemrakarsa, sosialisasi yang terlambat dan kerenggangan sosial.

Konflik saat ini yaitu pemilik tanah yang sudah menjual tanah dengan harga Rp100.000,00/meter meminta penyetaraan harga menjadi Rp400.000,00/meter sehingga masyarakat menutup akses informasi dari pihak pemrakarsa. Perilaku

menuntut penyetaraan harga ini dalam bentuk pemasangan spanduk di sepanjang jalan menuju pantai Ujungnegero. Spanduk-spanduk ini juga dipasang di depan Balai Desa Karanggeneng. Spanduk ini berisi pesan untuk PT BPI untuk menyetarakan harga tanah karena kesepakatan awal jika terdapat perubahan harga tanah semua akan disetarakan.

Forum Komunikasi sebagai Penyelesaian Konflik

Forum komunikasi warga PLTU Batang merupakan perwujudan dari model komunikasi konvergen. Untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dalam penyebaran informasi membutuhkan saling pengertian satu sama lain. Komunikasi selalu merupakan tindakan bersama, suatu proses konvergensi (*convergency*) dimana dua orang atau lebih berpartisipasi dalam tukar menukar informasi untuk mencapai saling pengertian antara satu dengan lainnya (Suprpto, 2009:77).

Konvergensi merupakan suatu kecenderungan menuju titik yang sama dalam hal ini yaitu kesepakatan atau saling memahami (*mutual agreemeni*). Dalam penyelesaian konflik diperlukan saling pengertian satu sama lain untuk mencapai kesepakatan yang dapat menyelesaikan konflik tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dalam tukar menukar informasi diantara kedua belah pihak.

Forum komunikasi warga ini bertugas sebagai: Menjadi perwakilan masyarakat dalam mengomunikasikan masukan, saran, pengajuan kegiatan, dan lainnya kepada PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) dan Pemerintah Kabupaten Batang melalui Forum Komunikasi; Menyampaikan hasil rapat kerja/diskusi forum komunikasi kepada masyarakat; Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Batang dan PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) membahas rencana kegiatan dalam rapat kerja forum komunikasi.

Negosiasi tidak Mementingkan Posisi

Menurut Fisher dkk negosiasi adalah suatu proses untuk memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan pilihan dan mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka (Fisher, 2001:96). Negosiasi dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu anggota forum komunikasi Desa Karanggeneng dan pihak pemrakarsa. Negosiasi yang baik dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik PLTU Batang yang sudah bertahun-tahun berlangsung. Titik awal negosiasi yang dilakukan oleh pihak pemrakarsa yaitu pengesahan forum komunikasi pada tanggal 15 November 2013. Forum komunikasi ini sebagai perwakilan masyarakat Desa Karanggeneng dalam bernegosiasi dengan pihak pemrakarsa.

Negosiasi dalam situasi konflik akan sulit bagi kedua belah pihak untuk sepakat dan melakukan negosiasi secara langsung. Negosiasi dilakukan oleh pihak pemrakarsa dan Forum Komunikasi Warga Desa Karanggeneng dalam bentuk rapat. Negosiasi ini dilakukan di Kantor Kabupaten Batang dan merupakan negosiasi yang bersifat formal.

Sasaran dalam negosiasi terdapat 3 hasil yang akan dicapai yaitu *win-win*, *lose-win*, *lose-lose*. Proses negosiasi sangat penting karena akan menghasilkan keputusan-keputusan yang akan dijalani kedua belah pihak yang berkonflik dan membutuhkan waktu yang lama agar kedua belah pihak mencapai hasil *win-win*. Negosiasi untuk mencapai tujuan yang sama dibutuhkan rasa saling menghormati. Negosiasi harus dilakukan secara transparan dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri agar sama-sama menghasilkan keputusan yang baik.

Prinsip musyawarah ini menunjukkan bahwa terdapat saling tukar informasi untuk saling pengertian (*convergency*) dari kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Pada saat proses tawar menawar pencapaian yang diinginkan oleh kedua belah pihak mengalami

perbedaan hasil. Hasil yang diinginkan oleh pihak panitia forum komunikasi untuk pembenahan data penerima kompensasi sosial. Sedangkan menurut pihak pemrakarsa sudah memiliki kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria tersebut sudah ditandatangani oleh Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo. Setelah hasil proses negosiasi menyepakati untuk membuat data baru penerima kompensasi sosial. Proses negosiasi mengalami penundaan atau reses. Penundaan ini menurut Nasikin disebabkan oleh PT BPI yang belum dapat memvalidasi data penerima kompensasi tersebut. Negosiasi formal membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kepuasan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa proses negosiasi belum mencapai proses kesepakatan karena mengalami penundaan oleh satu pihak.

Kesimpulan dan saran

Sosialisasi PT BPI dan Pemerintah Kabupaten Batang kepada masyarakat Desa Karanggeneng dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi formal dan informal. Sosialisasi formal di Desa Karanggeneng yaitu sosialisasi umum tingkat desa, sosialisasi Amdal, dan sosialisasi tingkat Rukun Tetangga (RT). Sosialisasi formal di Desa Karanggeneng dilakukan dengan menggunakan metode ceramah. Metode ceramah yang dilakukan yaitu pertemuan tatap muka dengan format diskusi yang dilakukan untuk saling berbagi informasi. Sosialisasi dengan metode ceramah ditujukan agar masyarakat dapat melakukan forum yaitu waktu tanya jawab yang terjadi setelah pemaparan atau diskusi umum.

Sosialisasi informal awal dilakukan oleh Kepala Desa Karanggeneng yaitu pemberitahuan melalui *selapanan desa*. Selain kegiatan *community development* PT BPI memberikan informasi kepada media massa seperti kotak pengumuman, kotak saran. PT BPI juga menggunakan media massa seperti papan pengumuman dan kotak saran untuk dipasang di balai

desa Karanggeneng, koran, televisi, selebaran, spanduk, majalah, internet dan berbagai produk media massa untuk memberikan informasi terkait rencana pembangunan PLTU Batang.

Pesan di media massa tidak dapat diterapkan di Desa Karanggeneng karena sebagian besar masyarakat tidak membaca pengumuman dan berbagai pemberitaan tersebut. Hal ini dikarenakan tulisan yang kecil dan sebegian besar masyarakat Desa Karanggeneng tidak suka membaca dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Sebagian besar masyarakat Desa Karanggeneng lebih mempercayai informasi dari tokoh masyarakat sehingga komunikasi antarpribadi yang dilakukan dengan tokoh masyarakat dan masyarakat yang sepaham merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi ketidakpastian informasi dan kecemasan masyarakat terkait pesan pembangunan PLTU Batang. Selain itu sosialisasi yang terlambat dari pihak pemrakarsa, masuknya informasi dari pihak selain pemrakarsa seperti LSM dan penjagaan yang ketat oleh aparat kepolisian dan TNI membuat masyarakat bersikap apriori dengan menunjukkan sikap malas dan tidak peduli terhadap sosialisasi PLTU Batang.

Forum Komunikasi Warga PLTU Batang sebagai Penyelesaian Konflik di Desa Karanggeneng

Salah satu penyelesaian konflik di Desa Karanggeneng sesuai dengan amanat amdal yaitu dengan dibentuknya forum komunikasi warga PLTU Batang. Forum komunikasi warga Desa Karanggeneng bertugas sebagai perwakilan masyarakat Desa Karanggeneng dalam mengomunikasikan pesan pembangunan kepada pemrakarsa, menyampaikan hasil rapat kerja kepada masyarakat Desa Karanggeneng dan bersama-sama dengan pemrakarsa membahas rencana kegiatan dalam rapat kerja forum komunikasi.

Tugas pertama panitia forum komunikasi warga yaitu menyampaikan surat undangan kompensasi sosial bagi petani penggarap dan buruh tani di Desa Karanggeneng karena panitia forum komunikasi yang lebih paham kondisi dan fakta di lapangan. Panitia forum komunikasi menegosiasikan jumlah penerima kompensasi sosial dan kriteria penerima kompensasi tersebut. Negosiasi ini menggunakan prinsip *win-win solution* agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan konflik PLTU Batang.

Negosiasi yang dilakukan pada saat rapat kerja tidak berjalan dengan baik karena tidak terdapatnya keterbukaan informasi dan saling pengertian antara kedua belah pihak. Panitia forum komunikasi Desa Karanggeneng menghendaki menambah jumlah penerima dan merubah kriteria penerima kompensasi sosial sesuai dengan fakta di lapangan sedangkan pemrakarsa menghendaki jumlah penerima sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Amdal PLTU Batang.

Forum komunikasi warga ini belum dapat menyelesaikan konflik kompensasi sosial di Desa Karanggeneng karena belum adanya kepastian dari pihak pemrakarsa mengenai jumlah penerima kompensasi sosial. Karena belum adanya validasi data maka forum komunikasi warga Desa Karanggeneng akhirnya terhenti dan menunjukkan sikap saling memisah (*divergency*) antara panitia forum komunikasi dengan pihak pemrakarsa yaitu PT. BPI dan Pemerintah Kabupaten Batang.

Saran

Penyebaran inovasi pembangunan dengan prinsip keterbukaan informasi, komunikasi yang setara, melibatkan partisipasi masyarakat maka proses penyebaran informasi di Desa Karanggeneng akan berjalan dengan baik. Ketika komunikasi *bottom up* pada saat negosiasi antara panitia forum komunikasi sebagai perwakilan masyarakat dan pihak pemrakarsa

dilakukan diharapkan dapat direncanakan dengan baik, berkesinambungan, dilakukan secara rutin, saling tukar menukar informasi secara terbuka, mendengarkan secara objektif, melakukan negosiasi secara berkala untuk membahas penyelesaian konflik PLTU Batang, dan menggunakan berbagai metode dan media untuk menciptakan aliran komunikasi yang baik sehingga menuju titik yang sama proses pembangunan akan berjalan lancar dan masyarakat mendapatkan pertanggung jawaban perusahaan dalam *community development*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2002). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah*. (2012). Jawa Tengah: PT BPI
- Beebe, Steven dan Masterson, John. (1993). *Communication in Small Groups Principles and Practices*. New York: Harper Collins College Publishers.
- Biro Pusat Statistik. (2013). *Batang dalam Angka 2013*. Batang: BPS.
- Biro Pusat Statistik. (2013). *Kecamatan Kandeman dalam Angka 2013*. Batang: BPS.
- Biro Pusat Statistik. (2013). *Statistik Daerah Kabupaten Batang 2013*. Batang: BPS.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Daymon, Christine. (2008). *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Marketing Communication* (Terj: Wiratama, Cahya). Yogyakarta: Bentang.
- Effendy, Onong Uchjana. (2002). *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fisher, Williams dan kawan-kawan. (2001). *Mengelola Konflik* (Terj: S.N. Kartika, dan kawan-kawan). Jakarta: SMK Grafika Desa Putra.
- Husaini, Kristianto, Erwin. (2012). *Kritis Setia Pada Fakta*. Semarang: LBH Semarang.
- Jackman, Ann. (2005). *How To Negotiate*. (Terj: Chefira Inda). Indonesia: Erlangga
- Kriyantono, Rachmat. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Laporan Pemantauan Pelaksanaan RKL dan RPL Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Periode Agustus 2013 – Februari 2014*. (2014). Jakarta: PT Bhimasena Power Indonesia.
- Laporan Riset Focus Group Discussion PLTU Batang*. (2012). Semarang: Lembaga Bantuan Hukum.
- Levis, Rafael. (1996). *Komunikasi Penyuluhan Desa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Littlejohn, Stephen dan Foss, Karen. (2009). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Miall, Ramsbotham, Woodhouse. (2002). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT Grasindo Persada.
- Moleong, Lexy. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pace, Wayne dan Faules, Don. (2010). *Komunikasi Organisasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pruitt, Dean dan Rubin, Jeffrey. (2011). *Teori Konflik Sosial*. Terj: Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rejeki, Ninik Sri dan Anita Herawati. (1999). *Dasar-Dasar Komunikasi Untuk Penyuluhan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Riefky, Prasetya. (2009). *Sosialisasi Panitia Tanah dalam Kerangka Pembangunan Jalan Tol Semarang Solo*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Severin, Werner dan Tankard, James. (2008). *Teori Komunikasi Sejarah, Metode, dan Terpaan di dalam Media Massa*. (Terj: Sugeng Hariyanto). Jakarta: Kencana.

Sumarto, Hetifah. (2004). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sunarto, Hussein, dan kawan-kawan. (2011). *Mix Methodology Penelitian Komunikasi*. Jogjakarta: Buku Litera.

Suprpto, Tommy. (2009). *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Jogjakarta: MedPress

Susan, Novri. (2009). *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Yin, Robert. (2003). *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: RajaGrafindo

Koran dan majalah:

Harian Wawasan. 8 November 2013. *Dibentuk, Forum Komunikasi Warga PLTU Batang*. hlm. 16.

Kabar Kadin. (2011). Edisi 02 November-Desember. *Bhimasena Garap PLTU Batang*. hlm. 10-12.

Sandi, Rio. 8 Oktober 2013. *Kejasama RI-Jepang PLTU Batang 1 Juta Kw Dilarjutkan*. Bisnis Indonesia. hlm. 1.

Internet:

BPI Bentuk Forum Komunikasi. (2013). Dalam <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/11/16/243308> diunduh pada 6 Agustus 2014.

Bupati Jarji PLTU Tidak Menyengsarakan Masyarakat. (2013). Dalam

<http://batangkab.go.id/?p=3092> diunduh pada 6 Agustus 2014.

Definisi renggang. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam <http://kbbi.web.id/renggang>. Diunduh pada 2 Desember 2014.

Garjar: Sosialisasi PLTU Buruk. (2013). Dalam <http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=83889/Garjar:-Sosialisasi-PLTU-Batang-Buruk>. Diunduh pada 6 Agustus 2014.

PLTU Dipastikan Tetap Dibangun di Batang. (2014) <http://batangkab.go.id/?p=3661> diunduh diunduh pada 6 Agustus 2014.

Revitalisasi Sistem Amdal. (2013). Dalam <http://www.menlh.go.id/amdal/>. Diunduh pada 1 Desember 2014.

Salah Sosialisasi, Awal Mula Konflik PLTU Batang. (2014). Dalam <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/02/06/190059>. diunduh pada 6 Agustus 2014.

Vanwynsberghe, Rob and Khan, Samia. (2007). *Redefining Case Study*. Dalam http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/6_2/vanwynsberghe.htm. Diunduh pada 6 Agustus 2014.

Visi dan Misi Kabupaten Batang. (2014). http://batangkab.go.id/?page_id=341 diakses 25 September 2014.

Gambar :

Peta Kabupaten Batang. <http://batang17.blogspot.com/2012/08/peta-kabupaten-batang.html> diakses tanggal 25 September 2014.